

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan politik diniscayakan dapat merealisasikan esensi politik yang sebenarnya.<sup>1</sup> Politik yang seringkali ditafsirkan secara peyoratif berkembang di masyarakat dan sudah melegitimasi. Di tengah-tengah masyarakat dan konsumsi publik yang negatif terhadap politik, dibutuhkan pendidikan politik yang terus-menerus guna meluruskan makna politik yang sebenarnya. Lebih spesifiknya, pendidikan politik ditujukan guna menyadarkan masyarakat bahwa melek politik adalah hal yang sangat perlu. Sebab, masa depan sebuah negara tergantung dari kondisi politik yang ada. Sehingga dengan kesadaran penuh dari masyarakat akan berdampak signifikan terhadap tingkat partisipasi politik baik dalam hal mengontrol kebijakan maupun dalam pemilu. Bukan hanya itu, tingkat pendidikan politik juga biasanya menentukan perilaku pemilih ketika memilih seorang pemimpin. Sehingga ketika pendidikan politik di masyarakat teralisasi dengan tepat, perilaku pemilih biasanya berpotensi untuk menghasilkan pemimpin yang baik.

Pendidikan politik biasanya dilakukan oleh pemerintah, partai politik

---

<sup>1</sup> Menurut Plato dan Aristoteles, politik dimaknai sebagai *en dam onia* atau *the good life*. Politik adalah usaha untuk menggapai kehidupan yang baik. Artinya, politik sebenarnya bukan seperti yang dilihat dan dirasakan oleh kebanyakan masyarakat sekarang yang mungkin berkonotasi negatif. Tapi, jauh dari itu, politik berbicara tentang bagaimana mengelola negara untuk kepentingan bersama dan demi kebaikan bersama. Miriam Budiarto “*Dasar-Dasar Ilmu Politik*” (Jakarta: Gramedia, 2008), 13-17.

atau pun anggota masyarakat secara terencana, sistematis, dan dialogis dalam rangka untuk mempelajari dan menurunkan berbagai konsep, simbol, nilai- nilai, dan norma norma politik dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Melalui pendidikan politik individu diajarkan bagaimana mereka mengumpulkan informasi dari berbagai media massa, diperkenalkan mengenai struktur politik, lembaga- lembaga politik, lembaga- lembaga pemerintahan, dan lain sebagainya.

Dalam negara yang menganut sistem demokrasi, salah satu indikasi terpenting yang dijadikan sebagai tolak ukur untuk mengatakan suatu negara bagus secara demokrasi atau tidak ialah partisipasi politik masyarakat. Semakin tinggi partisipasi politik dalam masyarakat, maka semakin maju juga demokrasinya. Sebaliknya, semakin rendah partisipasi politik masyarakat, maka semakin rendah juga demokrasinya.<sup>2</sup>

Indikator demokratisasi sebuah negara yang menganut sistem demokrasi dapat dilihat dari keberhasilannya dalam menjalankan pemilihan umum. Sistem pemilihan umum merupakan salah satu sistem atau kelembagaan penting yang harus dijalankan oleh negara- negara yang menganut sistem demokrasi sehingga negara tersebut dapat dikatakan sebagai negara yang demokratis.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Frans Magnis Suseno, "Mencari Sosok Demokrasi, Sebuah Telaah Filosofis ( Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997).

<sup>3</sup>Ellya Rosana, Negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, Jurnal TAPIs Vol 12 No. 1

Pasca amandemen UUD (Undang- Undang Dasar) 1945, kedaulatan dilaksanakan dalam bentuk kekuasaan penyelenggaraan negara. Kekuasaan tersebut dijalankan sesuai dengan wewenang lembaga-lembaga negara yang diatur oleh UUD 1945. Selain oleh lembaga negara, kedaulatan penyelenggaraan negara juga dilaksanakan oleh rakyat sendiri, yang perwujudannya melalui PEMILU (Pemilihan Umum). Salah satunya adalah untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagai Gubernur/ Wakil Gubernur, yang akan memerintah Provinsi; serta Walikota/Wakil Walikota atau Bupati/Wakil Bupati, yang akan memerintah di Kota/Kabupaten. Hal ini diharapkan agar kepala daerah yang terpilih sesuai dengan kehendak bersama masyarakat, berdasarkan visi, Misi, program, serta kualitas dan integritas calon.<sup>4</sup>

Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) merupakan perwujudan pengembalian hak-hak politik kepada masyarakat di daerah dalam rangka rekrutmen pemimpin daerah, sehingga terbentuk pola demokrasi di tingkat lokal (Haris, 2009; dan Simamora, 2011).<sup>5</sup>Partisipasi politik masyarakat (pemilih) merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi. Dalam hubungannya dengan demokrasi, partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat dalam suatu

---

<sup>4</sup>Hutapea, Bungasan. (2015). “Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia” dalam *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol.4, No.1

<sup>5</sup>Prasojo, Eko. (2008). “Mainstreaming Decentralized Governance in Indonesia”. *Unpublished Research Report*. Depok: UI [University of Indonesia].

pemerintahan dipandang sebagai evaluasi dan kontrol masyarakat terhadap pemimpin atau pemerintahan.<sup>6</sup>

Sistem pemilihan umum di Indonesia masih terbilang belum sepenuhnya mampu merepresentasikan kehendak masyarakat Indonesia, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan. Masyarakat Indonesia pada umumnya telah mampu mengikuti proses pemilu dan menghormati hasil pemilu, namun pemilu di Indonesia masih banyak menghadapi kendala-kendala dalam pelaksanaannya. Pemilu menjadi indikator yang paling mudah dalam menentukan sebuah negara tersebut demokratis atau tidak, karena pemilu memberikan sebuah momentum kepada masyarakat untuk menentukan arah perkembangan sebuah negara.<sup>7</sup>

Proses sistem demokrasi yang terjadi pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara tahun 2020 mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti teralisasikannya program-program sosialisasi yang dilakukan oleh KPU, sehingga berdampak pada meningkatnya partisipasi sampai ke desa-desa. Perlunya peningkatan informasi kepada masyarakat mengenai proses pemilu yang penting seperti informasi pra kandidat, proses pencalonan kandidat, proses penghitungan suara sampai calon terpilih, kampanye pemilu yang sesuai hukum, cara masyarakat

---

<sup>6</sup>Melfa, Wendy. (2013). *PEMILUKADA: Demokrasi dan Otonomi Daerah*. Lampung: BE Press.

<sup>7</sup>Iqbal M. Mujtahid, [http. Makalah Pendidikan Politik Terpadu Bagi Masyarakat Menuju Pemilu 2014 Sesuai dengan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas 2013.co.id](http://Makalah Pendidikan Politik Terpadu Bagi Masyarakat Menuju Pemilu 2014 Sesuai dengan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas 2013.co.id), Hal 1-2

mendaftar diri sebagai pemilih, tata cara yang tepat memakai surat suara, dan di mana serta kapan harus memilih.

Menjadi momentum dan tugas pokok dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Salah satu tugas dan kewenangan KPU yaitu melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu serta tugas dan kewenangan KPU kepada masyarakat. Pemilih merupakan ujung tombak untuk menentukan calon yang terpilih pada proses Pemilu. Oleh karena itu, banyak permasalahan yang muncul seperti; *money politic*, penggelembungan suara, pemilih ganda, pemalsuan daftar mata pilih, yang dilakukan oleh pihak penyelenggara Pemilu. Hal tersebut merupakan bentuk dari penyalahgunaan kekuasaan dalam Pemilu, yang seharusnya tidak dilakukan. Kurangnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya suara mereka sebagai pemilih menimbulkan keprihatinan mendalam. Dimana masyarakat sekarang ini sudah menjadi masyarakat yang apatis terhadap pemerintah.

Penerapan sistem pemilihan umum di Indonesia masih terbilang belum sepenuhnya mampu merepresentasikan kehendak rakyat Indonesia. Pasca reformasi perubahan sistem pemilu yang sebelumnya menggunakan sistem pemilihan proporsional tertutup menjadi proporsional terbuka memang relevan bagi sosio-kondisi Indonesia sendiri dan tuntutan rakyat untuk menyelenggarakan pemilihan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dengan kata lain sangat diharapkan adanya transparansi terhadap penyelenggaraan pemilihan umum. Penilaian sistem pemilu dapat

dilihat dari berbagai sudut pandang yaitu kondisi sistem ekonomi, kondisi lembaga-lembaga politik, proses pemungutan suara, proses pemilihan kepala daerah, tatacar pemilihan, tingkah laku masyarakat dalam memilih, partisipasi perempuan dalam partai politik, pendapat masyarakat mengenai demokrasi, dan munculnya masalah- masalah baru dalam pemilu. Kandidat yang maju telah diseleksi sebelumnya karena harus memenuhi persyaratan dan sistem sesuai peraturan yang berlaku. Sistem pemilu saat ini merencanakan bayak pemilu kepala daerah sehingga dalam melakukan proses pemungutan suara diperlukan informasi dan tatacara pemilu yang efektif kepada masyarakat luas.<sup>8</sup>

Munculah sebuah tawaran untuk penyelesaian permasalahan dalam proses pemilu khususnya dalam suatu daerah desa yaitu dengan pendidikan politik terpadu. Pendidikan politik terpadu merupakan jawaban intelektual dari persoalan pemilu yang semakin lama semakin tidak jelas arahnya dan semakin banyak penyimpangan yang terjadi. Pendidikan politik bagi pemilih perlu mendapatkan fokus yang jelas. Ini terkait dengan proses segmentasi pendidikan pemilih. Pemilih pemula merupakan segmentasi penting dalam upaya melakukan pendidikan bagi pemilih dan tentunya pendidikan bagi pemilih pemula ini tidak hanya dilakukan ketika

---

<sup>8</sup>Iqbal M. Mujtahid, Pendidikan Politik Terpadu Bagi Masyarakat Menuju Pemilu 2014 Sesuai dengan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas 2013, Hal 3

masuk usia pilih. Kurangnya informasi penting mengenai proses pemilihan merupakan masalah yang harus ditangani secara serius karena hal ini harus dimengerti oleh masyarakat yang memilih dalam pemilu. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu diperlukan sumber informasi seperti brosur, iklan di media cetak/internet, surat-surat melalui pos, kampanye iklan di radio, poster, debat/dialog kandidat pemilu dan lain-lain. Jika pemilih secara keseluruhan sudah memiliki pengetahuan mengenai politik dan pemilu, bukan tidak mungkin korupsi dapat dihindarkan bahkan dihilangkan. Karena masyarakat akan menjadi pengawas atas segala penyelenggaraan kegiatan negara, sesuai dengan kedaulatan berada ditangan rakyat.

Di negara-negara demokrasi konsep partisipasi politik bertolak dari paham bahwa kedaulatan ada ditangan rakyat, yang dilaksanakan melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan serta masadepan masyarakat itu dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang tampuk pimpinan. Jadi partisipasi politik merupakan pengecualian dari penyelenggaraan kekuasaan politik yang abash oleh rakyat. Anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam proses politik, misalnya melalui pemberian suara atau kegiatan lain, terdorong oleh keyakinan bahwa melalui kegiatan bersama itu kepentingan mereka akan tersalur atau sekurang-kurangnya di perhatikan, dan bahwa mereka sedikit banyak dapat memengaruhi tindakan dari mereka yang berwenang untuk membuat

keputusan yang mengikat. Dengan kata lain, mereka percaya bahwa kegiatan mereka mempunyai efek politik (*political efficacy*).<sup>9</sup>

Dari pembahasan cikal-bakal pendidikan politik serta pembahasan Pemilihan Kepala Daerah langsung termasuk pemilihan Bupati dan wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020 diyakini memiliki kapasitas yang memadai untuk memperluas partisipasi politik masyarakat, sebagaimana yang telah terjadi pada Pilkada Musi Rawa Utara menunjukkan dari tahun sebelumnya mengalami peningkatan partisipasi politik masyarakat di Desa Suka Raja, artinya dengan terjadinya fenomena tersebut menunjukkan keaktifan dan keikutsertaan masyarakat dalam merayakan serta memerikan pesta demokrasi tersebut dengan cara memberikan hak pilihnya. Pemilihan Kepala Daerah langsung menjadikan alasan munculnya berbagai varian preferensi pemilih yang menjadikan berbagai faktor determinan dalam melakukan tindakan politik untuk mengapresiasi sistem politik demokrasi tersebut. Sebagaimana Masyarakat di Desa Sukaraja mempunyai keberagaman latar belakang gender, usia, etnis, agama, Ketokohan, pendidikan, pendapatan, dan basis partai.<sup>10</sup>

Pemilihan Kepala Daerah yang digelar di Desa Sukaraja dalam pilkada serentak 2020 kemarin, partisipasi masyarakatnya meningkat. Jumlah pemilih mengalami peningkatan dari angka

---

<sup>9</sup>Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 2008). Hal 368-369

<sup>10</sup> Martinus, 2013, "ANALISIS PERILAKU PEMILIH PADA PEMILIHAN GUBERNUR DKI JAKARTA PERIODE 2012-2017", Vol.4 No. 1, 2013, 58.



pemilih di tahun sebelumnya. Berkembangnya pemahaman serta pendidikan politik masyarakat berimplikasi signifikan terhadap tinggi rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilu, sehingga angka pemilih mengalami kenaikan. Meningkatnya tingkat partisipasi politik masyarakat tentu mengindikasikan bahwa lembaga yang bertugas mensosialisasikan pemilihan umum cukup signifikan sehingga mampu berdanpak secara maksimal. Sehingga harus ada langkah-langkah yang diambil guna meningkatkan efektivitas sosialisasi secara terus-menerus. Hal demikian pasti menjadi indikasi penting yang bisa berdanpak signifikan.

Pemilihan Kepala Daerah di wilayah Musi Rawas Utara Tahun 2020 yang telah dilaksanakan, hal tersebut sangat menyita perhatian khususnya pada masyarakat di Desa Sukaraja yang mengikuti proses Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020. Melalui proses Pemilihan Kepala Daerah tersebut maka penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana **perilaku memilih masyarakat Desa Suka Raja**. Oleh karna itu dari penjelasan tersebut penulis mengangkat judul Skripsi untuk penelitian yaitu **“Perilaku Pemilih Masyarakat Desa Suka Raja Kecamatan Karang Jaya Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakan di atas, maka dapat ditemukan masalah-masalah yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana Perilaku Pemilih masyarakat Desa Sukaraja Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara dalam pemilihan Bupati dan wakil Bupati Musi Rawas Utara 2020?
2. Faktor apa yang mempengaruhi masyarakat Desa Sukaraja Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara dalam menentukan pilihan Bupati dan wakil Bupati 2020?

### **1.3 Batasan Masalah**

Memperhatikan luasnya cakupan latar belakang masalah yang akan diteliti mengenai “Perilaku Pemilih Masyarakat Desa Sukaraja Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara (Analisis Pada pemilihan Bupati dan wakil Bupati 2020), maka perlu adanya batasan masalah untuk mengantisipasi melebarnya penelitian ini. Batasan penelitian ini adalah bagaimana Perilaku Pemilih Masyarakat Desa Sukaraja Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara dalam pemilihan Bupati dan wakil Bupati 2020.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah “Bagaimana Perilaku Pemilih Masyarakat di Desa Sukaraja Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020?”

## **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka secara umum peneliti bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Perilaku Pemilih Masyarakat di Desa Sukaraja Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menggambarkan dan menganalisa pendidikan politik dan pengaruhnya terhadap partisipasi politik masyarakat di Desa Sukaraja Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara berdasarkan latar belakangnya.
2. Untuk menggambarkan dan menjelaskan bagaimana dan sampai dimana partisipasi politik masyarakat Desa Sukaraja Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara dalam pemilihan Bupati dan wakil Bupati.
3. Untuk mengetahui bagaimana serta apa saja faktor yang mempengaruhi Perilaku politik masyarakat di Desa Sukaraja Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara dalam Pilkada Tahun 2020.

## **1.6 Manfaat Penelitian**

1. Memberi sumbangan pemikiran yang mengarah pada pengembangan teori-teori keilmuan, khususnya pada kajian pendidikan ilmu politik.
2. Memberi wawasan keilmuan dan memperkaya kajian tentang

pendidikan dan partisipasi masyarakat dalam politik dan keikutserataan masyarakat dalam bidang politik.

3. Memberikan bahan rujukan kepada masyarakat yang berminat dalam memahami realitas ilmu politik.